

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang mengamati fenomena secara sistematis melalui hubungan-hubungannya untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena (Sugiyono, 2020). Sedangkan, Creswell (2016) mengartikan teori sebagai variabel dan proposisi yang saling berhubungan yang mana menyajikan pandangan sistematis mengenai fenomena dengan mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan fenomena ilmiah.

##### **2.1.1 Teori Ilmu Pertahanan**

Ilmu Pertahanan, menurut Makmur Supriyatno (2014), adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada masa damai, perang, dan pasca perang untuk merespon upaya perlindungan keamanan nasional dalam konteks militer dan non-militer. ancaman militer terhadap integritas teritorial, nasional, dan internasional. Keamanan semua negara (Supriyatno, 2014 ).

Dalam ilmu politik, pertahanan merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan (Tippe, 2016). Pertahanan adalah kebutuhan dasar semua makhluk hidup. Ia perlu membangun pertahanan yang kuat jika tidak ingin dikuasai lawan. Pertahanan adalah seni bertahan hidup, baik bagi mereka yang mampu atau bagi mereka yang hanya menginginkan rasa aman dan damai.

Jadi, pada hakikatnya pertahanan negara adalah kekuatan bersama (sipil dan militer) yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin keutuhan wilayah, melindungi rakyatnya, dan/atau melindungi kepentingannya

dari ancaman yang ditimbulkan oleh negara, aktor, dan aktor non-negara lainnya.

Teori ilmu pertahanan di atas digunakan dalam menganalisa pentingnya suatu pertahanan bagi keutuhan dan kedaulatan suatu negara.

### **2.1.2 Teori *Naval Forces***

Menurut Rudy Sutanto dalam bukunya yang berjudul *Naval and Maritime Strategy* angkatan laut adalah cabang dari angkatan bersenjata suatu negara yang misi utamanya adalah melakukan operasi militer di dalam dan dari laut (Sutanto, 2022). Di negara-negara tertentu, angkatan laut digabungkan dengan tentara atau angkatan bersenjata. Beberapa institusi, seperti US Coast Guard, bukan merupakan armada yang memiliki kemampuan untuk melakukan operasi maritim yang substansial (USCG).

Angkatan laut pada dasarnya adalah kekuatan respons yang cepat dan mudah beradaptasi (Sutanto, 2022). Akan lebih mudah untuk menyiagakan pasukan dalam kasus krisis anggaran ketika kesepakatan kesulitan berlaku, tetapi yang lain dapat terlibat dalam misi masa damai (seperti keamanan maritim atau operasi kemanusiaan). Karena fleksibilitas dan keserbagunaannya, angkatan laut dapat memenuhi kebutuhan ini. Perbedaan antara fleksibilitas dan keserbagunaan adalah bahwa fleksibilitas mengacu pada berbagai cara armada dapat dikerahkan, sedangkan keserbagunaan mengacu pada berbagai tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan atau dalam urutan kapal yang sama. Keduanya merupakan aset penting untuk armada di wilayah mana pun di dunia yang mengalami pemotongan anggaran besar.

Teori *Naval Forces* di atas digunakan dalam menganalisa pentingnya eksistensi angkatan laut dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia khususnya di perairan perbatasan.

### **2.1.3 Teori *Naval Power***

Kekuatan angkatan laut memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan negara maritim. Pengaruhnya cukup signifikan pada masa damai maupun di masa perang. Kekuatan angkatan laut adalah salah satu faktor kunci dalam menghalangi lawan yang kuat untuk berperang (Vego, 2008). Dalam masa perang, kekuatan angkatan laut merupakan prasyarat untuk keberhasilan pelaksanaan operasi di darat. Dan hasil akhir dari sebuah perang tidak dapat diubah di darat. Kekuatan angkatan laut juga memainkan peran penting di seluruh spektrum operasi perang. Kisaran ancaman di ranah maritim sangat luas. Ancaman konvensional di masa damai termasuk klaim negara riparian sehubungan dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan aktivitas di sana, luas perairan teritorial dan hak lintas damai, dan penangkapan ikan ilegal. Angkatan laut dapat dipekerjakan dalam kegiatan rutin dalam operasi masa damai selain perang, konflik intensitas rendah, dan perang konvensional intensitas tinggi. Angkatan laut akan digunakan secara dominan dalam melaksanakan berbagai misi dan "operasi sebelum perang". Namun, sekuat apapun angkatan laut, tetap tidak dapat menjalankan semua misi sendirian tetapi harus berjalan bersama dengan elemen kekuatan angkatan laut lainnya, seperti penjaga pantai.

Kekuatan angkatan laut akan terus memainkan peran penting dan vital dalam melindungi dan melestarikan kepentingan suatu negara di laut. Hal ini terutama berlaku untuk negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan negara lainnya termasuk Indonesia yang kemakmuran dan kesejahteraan ekonominya bergantung pada penggunaan laut secara bebas dan tanpa gangguan. Kekuatan angkatan laut tidak diragukan lagi merupakan alat yang ampuh untuk mendukung kebijakan luar negeri, strategi militer, dan berbagai operasi perdamaian. Bersamaan dengan sumber kekuatan militer dan nonmiliter negara lainnya, kekuatan

angkatan laut memiliki peran besar dalam mencegah pecahnya permusuhan skala besar. Selain itu, dalam kasus konflik regional atau global, kekuatan di darat pada akhirnya tidak dapat berhasil tanpa penggunaan laut yang aman. Memperoleh, memelihara, dan menjalankan kendali atas lautan adalah tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa kekuatan angkatan laut yang kuat dan efektif (Vego, 2008).

Teori *naval power* di atas digunakan dalam menganalisa kekuatan angkatan laut yang memiliki esensi dalam menjaga keamanan di wilayah perairan khususnya di perairan perbatasan.

#### **2.1.4 Teori Kebijakan**

Kebijakan memiliki konotasi yang mencakup berbagai perspektif dan tujuan. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Karl Friedrich (sebagaimana dikutip dalam Agustino, 2006) yaitu kumpulan tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh orang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan hambatan dan peluang, serta kebijakan yang direkomendasikan untuk membantu mencapai tujuan yang dimaksud (sebagaimana dikutip dalam Prakoso, 2021). Sedangkan menurut kamus politik Marbun, kebijakan adalah konsep dan prinsip yang menjadi landasan suatu rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan/organisasi, pernyataan tujuan, sasaran, atau sasaran sebagai pedoman (Marbun, 2007).

Umumnya, kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang, seperti pejabat, organisasi, atau institusi tertentu, untuk mengatasi suatu masalah. Noeng (2003), mendefinisikan kebijakan sebagai upaya memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat seperti keadilan dan kesejahteraan umum. Setidaknya ada empat hal penting yang harus dipenuhi dalam kebijakan tersebut: peningkatan taraf hidup masyarakat; keadilan: keadilan sosial, dan kesempatan untuk mewujudkan dan menciptakan individu; memberikan kesempatan partisipasi masyarakat (dalam

membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan); dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kebijakan merupakan pedoman umum dan batasan-batasan yang menjadi arah yang dipilih dan aturan-aturan yang dianut oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting dalam pengorganisasian dan pengambilan keputusan atas rencana-rencana yang disusun. Dengan demikian kebijakan menjadi mekanisme penyelesaian masalah atas tindakan yang terjadi.

### **2.1.5 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terjadi setelah arahan kebijakan dikeluarkan dan memerlukan upaya untuk mengontrol input untuk mendapatkan output atau hasil bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dipisahkan dari tahap perumusan kebijakan. Di satu sisi, pembuatan kebijakan adalah proses dari bawah ke atas di mana ambisi, permintaan, atau dukungan publik berfungsi sebagai titik awal. Sebaliknya, implementasi kebijakan mengikuti logika top-down dalam arti bahwa berbagai kebijakan abstrak atau makro diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret atau mikro (Tachjan, 2006). Menurut Grindle (1980), implementasi adalah seperangkat tanggung jawab administratif yang komprehensif yang dapat dilaksanakan di berbagai tingkatan program (sebagaimana dikutip dalam Tachjan, 2006).

Menurut Van Meter dan Horn (1975), yang karyanya dikutip dalam Tachjan (2006), implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah dan sektor swasta, baik sendiri maupun kelompok, untuk mencapai tujuan tertentu. Grindle melanjutkan dengan menyatakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai dengan penetapan tujuan dan sasaran, dan bahwa program telah dibuat dan siap untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beragam perspektif para ahli di atas tentang pengertian implementasi kebijakan, dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah kritis dalam proses tindakan berbagai aktor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan tindakan yang ditargetkan untuk mencapai konsekuensi dari kegiatan. Untuk meningkatkan pemahaman dengan menggambarkan secara jelas variabel atau elemen yang memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Menurut para ahli, ada 5 (lima) model implementasi kebijakan, yaitu:

**a. Model George C. Edwards III**

George C. Edwards III (1980) (sebagaimana dikutip dalam Prakoso, 2021), melihat implementasi kebijakan sebagai proses dinamis dengan berbagai elemen yang berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Elemen-elemen ini harus ditentukan untuk menentukan dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi. Akibatnya, Edward menyatakan bahwa untuk melakukan studi implementasi, dua hal utama yang harus diperhatikan pertama-tama: Apa persyaratan untuk implementasi kebijakan? Apa faktor terpenting dalam implementasi kebijakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Edward menyarankan empat variabel yang penting untuk implementasi yang efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mana elemen ini nantinya dapat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan.

**b. Model Grindle**

Menurut Grindle (1980) (sebagaimana dikutip dalam Subarsono, 2011) implementasi merupakan suatu kebijakan yang sebagian besar dipengaruhi oleh substansi kebijakan (*public content*) dan konteks (*context of policy*). Grindle mengkaji implementasi kebijakan dari sudut pandang dampak lingkungan. Inti gagasannya adalah bahwa begitu kebijakan diterjemahkan

ke dalam program, implementasi berjalan sesuai rencana dan sepenuhnya independen dari substansi dan konteks kebijakan.

**c. Model Van Meter dan Van Horn**

Model Proses Implementasi Kebijakan dirancang oleh Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dikutip dalam Prakoso, 2021). Model ini menggambarkan bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang saling berhubungan. Relevansi pelibatan implementor dalam perumusan tujuan kebijakan adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Tetapi strategi mereka termasuk dalam klasifikasi pendekatan *top-down* (sebagaimana dikutip dalam Prakoso, 2021). Mereka mengklaim bahwa jaringan antar organisasi adalah bagaimana standar dan tujuan kebijakan didistribusikan kepada pelaksana.

**d. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.**

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) (sebagaimana dikutip dalam Wahab, 2008) menyatakan terdapat tiga aspek yang mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan, yaitu: karakteristik masalah, struktur manajemen program yang muncul dalam berbagai macam regulasi yang mengoperasionalkan kebijakan, dan faktor-faktor di luar peraturan kebijakan.

**e. Model Lukman Yudho Prakoso**

Dalam studi disertasinya tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menurut Lukman Yudho Prakoso (2016) bahwa implementasi kebijakan dapat berhasil diselesaikan jika memenuhi karakteristik *Integrative, Interactive, Transparency, and Control* (IITCA) (Prakoso L. Y., 2021).

Faktor pertama, yaitu *integrative*, adalah berkaitan dengan kebutuhan terhadap adanya integrasi antara lembaga pemerintah yang berkepentingan dan memiliki peran dalam pembangunan pertahanan Nasional. Faktor kedua, yaitu *interactive*, merupakan faktor penentu efektivitas dari implementasi kebijakan. Faktor ketiga, yaitu *transparency*, adalah faktor yang berkaitan dengan keterbukaan dari isi dan tujuan kebijakan bagi masyarakat. Faktor keempat, yaitu *controlling*, merupakan faktor yang menentukan kesesuaian antara implementasi dengan rencana kebijakan. Faktor terakhir, yaitu *accountability*, merupakan faktor yang menjadi pembentuk utama dari kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan lembaga yang berwenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Lukman Yudho Prakoso yaitu, *Integrative, Interactive, Transparency, and Control (IITCA)*. Peneliti mengacu pada model implementasi kebijakan Lukman Yudho Prakoso karena berhubungan langsung dengan topik penelitian dan dapat dinilai berdasarkan temuan. Pemeriksaan terhadap aspek - aspek tersebut akan menghasilkan masukan bagi proses implementasi kebijakan.

#### **2.1.6 Teori Ancaman**

Ancaman didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 sebagai setiap usaha, pekerjaan, kegiatan, atau tindakan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dinilai dan/atau terbukti membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional dalam berbagai aspek, antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sedangkan dalam Buku Putih Pertahanan (2008), ancaman adalah setiap usaha atau tindakan, baik di dalam maupun di luar negara, yang dianggap merugikan atau membahayakan negara, keutuhan wilayah negara,

atau keselamatan bangsa. Ancaman dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya: ancaman militer dan ancaman non-militer.

Ancaman militer adalah ancaman yang melibatkan kekuatan bersenjata dan terorganisir serta dianggap dapat membahayakan kerugian negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan nasional. Agresi, gangguan teritorial, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman terhadap keamanan laut dan udara, dan perselisihan masyarakat semuanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan. Sedangkan ancaman non militer pada dasarnya adalah ancaman yang menggunakan unsur non militer yang dapat membahayakan keutuhan, dan kedaulatan negara. Ancaman non-militer dapat mencakup elemen ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, teknis dan informasi, selain implikasi keselamatan publik.

Menurut Lemhanas (2013) ancaman militer dan ancaman non-militer adalah dua jenis ancaman. Ancaman militer terjadi ketika lawan menggunakan rencana teknologi dan taktis militeristik. Sedangkan bahaya nonmiliter, seperti inti Lemhannas, masuk dalam Delapan Gatra. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh dominan terhadap ketahanan nasional Indonesia antara lain Lingkungan Strategis, dimana terjadi dinamika geopolitik di tingkat global, regional, dan nasional, serta perkembangan dunia maya yang merupakan salah satu dampak dari perkembangan Komunikasi dan Teknologi Komunikasi, dan Revolusi Industri 4.0. Teori ancaman digunakan dalam menganalisa ancaman non militer yang terjadi di perbatasan laut Batam dengan Malaysia, antara lain: adanya *illegal migran*, penyelundupan orang dan barang, *illegal fishing*, dan *human trafficking*.

### **2.1.7 Teori Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimasi adalah suatu proses, teknik, dan tindakan untuk mengoptimalkan (membuat yang terbaik,

tertinggi, dan sebagainya). Sebaliknya, menurut *Oxford Dictionary* (sebagaimana dikutip dalam Rahayu, 2021), "optimasi adalah proses menemukan solusi terbaik untuk masalah tertentu ketika "terbaik" diputuskan oleh kriteria yang ditentukan." Jadi, optimasi adalah proses, teknik, dan tindakan (kegiatan) untuk menentukan solusi optimal dari suatu masalah berdasarkan kriteria tertentu. Optimasi adalah proses mengoptimalkan solusi untuk mengidentifikasi opsi optimal di antara alternatif yang tersedia. Optimasi dicapai dengan memaksimalkan fungsi tujuan tanpa kendala. Sebuah sistem dapat ditingkatkan dengan optimasi dengan meningkatkan profitabilitas, ketersediaan waktu, dan sebagainya.

Menurut berbagai ahli, seperti yang dijelaskan oleh Winardi (sebagaimana dikutip dalam Marwasta, 2016), optimasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, namun dari sudut pandang bisnis, optimasi adalah memaksimalkan operasi untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Optimasi alternatif dapat digambarkan sebagai prosedur untuk menghasilkan keadaan yang menawarkan nilai tertinggi atau minimum dari suatu fungsi, menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009). Penjelasan di atas menunjukkan bahwa optimasi hanya dapat dicapai jika dilakukan dengan sukses dan efisien. Agar optimal, tujuan terus-menerus menuju pencapaian hasil yang efektif dan efisien.

Teori optimalisasi digunakan dalam menganalisa upaya – upaya mengoptimalkan hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan pertahanan MEF.

### **2.1.8 Teori Strategi**

Kata "strategi" dapat dipahami sebagai rencana untuk menciptakan dan mengatur kekuatan militer guna mencapai tujuan tertentu. Dalam lingkup militer, frase "strategi" sering digunakan (Dewi, Laksmi, & Masitoh, 2009). Definisi lain dari strategi adalah bahwa strategi adalah usaha yang terkait erat

dengan konsep, prosedur, dan implementasi. Kegiatan berbasis tim dengan fokus pada mengenali keterbatasan dan bakat seseorang dan menggunakannya untuk mencapai tujuan organisasi dengan sukses disebut sebagai strategi (Tjiptono, 2000).

Dalam bidang militer, istilah strategi dicirikan oleh Lykke (1998) sebagai “seni dan ilmu mengerahkan angkatan bersenjata suatu bangsa untuk mencapai tujuan kebijakan nasional melalui penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan”. Artinya, strategi adalah seni dan ilmu pengerahan angkatan bersenjata suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan nasional. Strategi militer juga dapat dianggap sebagai cara penggelaran kekuasaan negara untuk menjamin tercapainya tujuan yang ditentukan, dan oleh karena itu kepentingan negara terpenuhi.

Strategi terdiri dari tiga komponen utama: tujuan yang akan dicapai (ends), kegiatan atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan (ways), dan alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan (means). Gagasan strategi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan taktik militer serta strategi dalam domain kunci lainnya (Lykke, 1998).

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk meningkatkan hasil penelitian, perlu dilakukan kajian literatur yang berkaitan dengan penekanan. Peneliti dalam contoh ini menyinggung berbagai studi masa lalu yang berkaitan dengan penyelidikan saat ini. Studi sebelumnya telah mengungkapkan beberapa persamaan dalam implementasi kebijakan di daerah perbatasan. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Doni Septian dalam jurnal tahun 2017 tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran (Septian, 2017), membahas pelabuhan bebas dan zona perdagangan bebas (FTZ) di Kabupaten Karimun, serta

upaya memaksimalkan keuntungan ekonomi dan sosial bagi daerah dan masyarakat, dalam rangka mengembangkan Kebijakan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut temuan kajian ini, pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pendalaman alur pelayaran di lapangan tidak sesuai dengan peruntukannya (Septian, 2017).

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Febry Triantama dalam jurnal tahun 2020 tentang Kerjasama Pengembangan *Medium Battle Tank* Harimau Sebagai Perwujudan Ketahanan Alutsista Tentara Nasional Indonesia (Triantama, 2020). Penelitian ini mengkaji realisasi kemandirian pertahanan, termasuk pembangunan *medium combat tank* Tiger yang bekerjasama dengan Turki. Gagasan tentang dorongan tekno-nasionalis dan pendekatan deskriptif analitis digunakan. Menurut penelitian ini, keinginan Indonesia untuk membangun medium battle tank merupakan strategi enkapsulasi alutsista pertahanan dan dilandasi oleh tujuan kekuasaan, uang, dan status (Triantama, 2020).
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Yudho Prakoso, Ivan Yulivan, Muhammad Ikmal Setiadi dalam jurnal tahun 2020 tentang Menghadapi Penyelundupan Manusia dengan Implementasi Kebijakan Publik Pengamanan Laut di Perairan Batam (Prakoso L. Y., 2020). Penelitian ini membahas mengenai Posisi Batam yang berada di Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Singapore, memunculkan peluang sekaligus permasalahan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Tujuan penelitian ini akan menemukan suatu strategi untuk dapat menghadapi ancaman tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan publik George Edward III. Hasil pembahasan tulisan ini menunjukkan, implementasi strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman penyelundupan manusia tidak optimal dengan segala permasalahan faktor (Prakoso L. Y., 2020).

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Endro Tri Susdarwono, Ananda Setiawan, Yomonah Nurul Husna dalam jurnal tahun 2020 tentang Kebijakan Negara Terkait Perkembangan Dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari Masa ke Masa (Susdarwono, Setiawan, & Husna, 2020), membahas tentang kebijakan Negara yang berkaitan dengan pembinaan dan rehabilitasi Industri Pertahanan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan analisis yang detail dan metodologi analisis normatif. (Susdarwono, Setiawan, & Husna, 2020).
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Johan Jeques Junior dalam jurnal tahun 2021 tentang Optimalisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan (Rahayu, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan perbatasan diimplementasikan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Penelitian ini meliputi metode kualitatif dan metodologi penelitian deskriptif. Temuan studi menunjukkan bahwa kebijakan tertentu yang ada dapat dioptimalkan kembali dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai sektor, seperti ancaman nasionalisme, koordinasi kelembagaan, interkoneksi sektor perdagangan, dan lain-lain. (Rahayu, 2021)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Doni Septian (2017) tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran	Membahas mengenai implementasi kebijakan	Berkokus pada analisa implementasi kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran.
2.	Febry Triantama (2020) Kerjasama Pengembangan Medium Battle Tank Harimau Sebagai Perwujudan Ketahanan Alutsista Tentara Nasional Indonesia	Membahas mengenai alutsista TNI AL saat ini	Berkokus pada Pengembangan Medium Battle Tank Harimau
3.	Lukman Yudho Prakoso, Ivan Yulivan, Muhammad Ikmal Setiadi (2020) Menghadapi Penyelundupan Manusia dengan Implementasi Kebijakan Publik Pengamanan Laut di Perairan Batam	Membahas mengenai Posisi Batam yang berada di Perbatasan Laut	Berkokus pada penyelundupan manusia yang terjadi di perbatasan laut Batam beserta implementasi kebijakan publik nya.
4.	Endro Tri Susdarwono, Ananda Setiawan, Yomonah Nurul Husna (2020) Kebijakan Negara Terkait Perkembangan dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari Masa ke Masa	Membahas MEF sebagai suatu standar dari minimum kekuatan	Berkokus pada revitalisasi industri pertahanan.
5.	Sri Rahayu dan Johan Jeques Junior (2021) Optimalisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)	Membahas penerapan kebijakan di daerah kawasan perbatasan	Penelitian ini berkokus pada optimalisasi pada kebijakan yang telah ada.

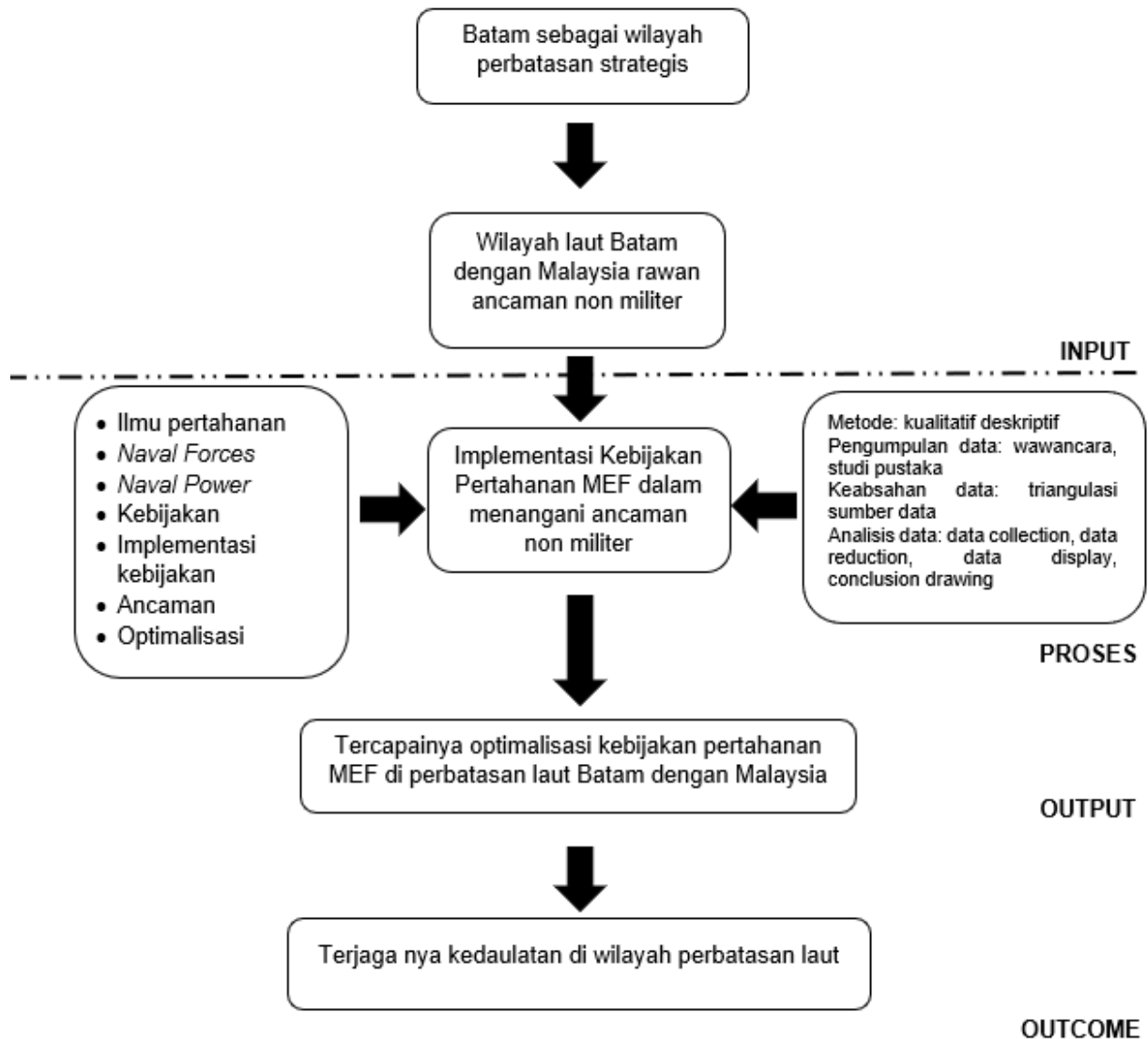
Sumber: (Diolah oleh Peneliti, 2022)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sekaran (sebagaimana dikemukakan dalam Sugiyono, 2020), merupakan pernyataan tentang bagaimana teori menghubungkan banyak aspek yang telah diakui sebagai perhatian kritis. Kerangka berpikir, sebagaimana didefinisikan dalam Pedoman Tesis Universitas (2021), adalah narasi (deskripsi) atau pernyataan (proposisi) mengenai kerangka pemecahan masalah yang telah dikembangkan. Kerangka berpikir secara konseptual menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Kaitan ini kemudian diformalkan sebagai paradigma penelitian. Akibatnya, setiap paradigma studi harus didasarkan pada kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, *framework* terdiri dari *input*, proses, dan *output*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga kerangka pemikiran terletak pada fenomena, gejala atau kasus yang pernah dilihat atau diamati langsung oleh peneliti. *Input* dalam penelitian ini adalah letak Batam sebagai wilayah perbatasan yang strategis dan wilayah lautnya dengan Malaysia rawan akan ancaman non militer. Selanjutnya, dari tahapan *input*, proses penelitian terdiri dari teori, konsep dan juga metodologi penelitian. Setelah tahapan proses penelitian, maka menghasilkan *output* yaitu tercapainya optimalisasi kebijakan pertahanan MEF di perbatasan laut Batam dengan Malaysia yang kemudian menghasilkan *outcome* yaitu terjaganya

kedaulatan di wilayah perbatasan laut Batam dengan Malaysia. Berikut adalah tahapan kerangka pemikiran:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**  
Sumber: (Diolah oleh Peneliti, 2022)